



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 100.3.2/1311 /2025

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH TAHUN 2025

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Gubernur;

MEMUTUSKAN.../2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditetapkan berdasarkan usulan SKPA/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan, Pemerintah Aceh dapat mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepada SKPA/Unit Kerja pengusul Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh, agar segera mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Gubernur Aceh berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, serta dapat melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya jika dipandang perlu.
- KELIMA : Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan/mekanisme pembentukan Peraturan Gubernur Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.2/1029/2025 tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 November 2025 M
12 Jumadil Awal 1447 H



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 100.3.2/ **1311** /2025
TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
GUBERNUR ACEH TAHUN 2025-----

SKPA	TENTANG	Jenis			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH ACEH	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah		✓		1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Menambah jumlah jabatan struktural	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Hari Libur Kelistimewaan dan Kekhususan Aceh			✓	berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b, pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Mendukung kegiatan keagamaan, adat istiadat dan momentum penting yang diadungkan, dilestariakan dan diperingati oleh masyarakat Aceh	Memudahkan Masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan, adat istiadat dan momentum penting yang diadungkan, dilestariakan dan diperingati oleh masyarakat Aceh	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembagian Lingkup Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah			✓	1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2. Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Mengatur Pembagian Lingkup Tugas Koordinasi Sekretaris Daerah	Memudahkan pengoordinasian Tugas Asisten Sekretaris Daerah	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi							
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2024 tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara				Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	mengatur pelaksanaan budaya kerja Aparatur Sipil Negara	Sebagai dasar pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas				1. Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 2. Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara	Mengatur pelaksanaan perjalanan dinas	Untuk tertibnya perjalanan dinas dan meningkatkan pengawasan serta akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas dilingkungan pemerintah aceh	
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan Dinas Pemuda dan Olahraga							
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara							
BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Badan Haji Aceh							
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH	Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		✓		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 4. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5. Peraturan gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Aceh	Landasan hukum bagi DPMPISP dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh	
	Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			✓	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Peraturan gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi yang tidak terdapat dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko yang dikelola oleh Pemerintah Pusat	Membeikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kurikulum Pendidikan Dayah			✓	1. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah 2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh	Kurikulum pendidikan dayah jenjang wustha dan ulys beserta kitab rujukan	Keseragaman kurikulum pendidikan dayah	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Standar Pelayanan Minimal Sarana dan Prasarana Dayah			✓	Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah	Standar pelayanan minimal	Adanya standar	

SKPA	TENTANG	Jenis			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Prasarana Dayah Secara Swakelola oleh Dayah/Balai Pengajian pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh		✓		Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah	Petunjuk teknis pelaksanaan	Adanya petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan/pengembangan dayah	
	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Dayah yang Bersumber dari APBA		✓		Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah	Hibah kepada dayah/balai pengajian	Tata cara pemberian hibah	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Insentif Pimpinan Dayah, Insentif Tengku/Guru Dayah dan Insentif untuk Kesejahteraan Ulama Dayah/Ulama Kharismatik			✓	Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah	Insentif Pimpinan Dayah, Insentif Tengku/Guru Dayah dan Insentif untuk Kesejahteraan Ulama Dayah/Ulama Kharismatik	Pemberian Insentif	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH	Peraturan Gubernur tentang Interoperabilitas Data Pemerintahan Aceh			✓	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 3. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu 4. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1596/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Aceh Tahun 2023	Pedoman Teknis Integrasi antar Sistem Informasi Elektronik yang terkait dengan aspek Interoperabilitas Data di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota	Memberikan pedoman teknis Integrasi antar Sistem Informasi Elektronik	
	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data		✓		Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri			
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Aceh			✓	Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota	Pedoman Pelaksanaan	Strategi Pengembangan dan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Selama 20 (dua puluh) Tahun	
	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Aceh			✓	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembangunan Gedung Negara	Petunjuk Teknis Pelaksanaan	Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Gedung Strategis	
	Revisi Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh		✓		Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 42 ayat 1 huruf e	Petunjuk Teknis Pelaksanaan	Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni	
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penyelenggara Peribadatan, Pengelolaan Harta dan Hasil Wakaf Masjid Raya Baiturrahman			✓		1. Standarisasi manajemen masjid 2. Tata ruang dan pekarangan masjid	1. Kurangnya pengelolaan standar manajemen masjid 2. Tidak maksimalnya pengaturan ruang dan pekerjaan para Imam, muazin dan khadam masjid	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Pengolahan Arsip Statis			✓	1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; 6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Standar Pengelolaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Program Registrasi Naskah Kuno Sebagai Ingatan Kolektif Nasional; 8. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan 9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;	Menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	sebagai acuan atau panduan teknis dalam mengolah arsip statis, untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Jadwal Retensi Arsip			✓	1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; 6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Standar Pengelolaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Program Registrasi Naskah Kuno Sebagai Ingatan Kolektif Nasional; 8. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan 9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;	sebagai alat untuk mengatur arsip berapa lama suatu arsip harus disimpan, dan kapan harus dimusnahkan atau diserahkan	Untuk Menghemat waktu pencarian informasi dengan cara mengedikan, Menghindari masalah hukum, Lebih efisien dalam mengatur arsip dinamis yang betul-betul penting, Menghemat tempat Dan Mengidentifikasi nilai guna arsip dinamis	

SKPA	TENTANG	Jenis			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dinamis Pemerintah Aceh			✓		Penambahan Klasifikasi sesuai Urusan, Kewenangan, Tugas dan Fungsi di lingkungan Pemerintah Aceh.	Penambahan Klasifikasi sesuai Urusan, Kewenangan, Tugas dan Fungsi di lingkungan Pemerintah Aceh.	Menunjuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
	Srikandi					menciptakan kelancaran dalam bidang komunikasi secara elektronik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan	Mempermudah proses pengarsipan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
	Arsip Terjaga					menjaga keutuhan, keaslian, dan keselamatan arsip negara yang berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara.	Memudahkan pencarian arsip yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat	
	Peraturan Gubernur Aceh Koleksi Naskah Kuno			✓		membantu masyarakat Indonesia untuk memahami rekam jejak budaya bangsa yang berisikan ragam budaya dengan nilai tinggi dan kejayaan masa lampau	agar koleksi nasional menjadi lebih kaya dan nilai-nilai luhur kebudayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan nusantara dapat terlestarikan dan didayagunakan oleh pemustaka. Upaya pengembangan koleksi naskah kuno yang dilakukan salah satunya dengan evaluasi pemanfaatan koleksi naskah kuno dalam bentuk tulisan digital.	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)			✓		sebagai salah satu alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan bangsa	meningkatkan keterbukaan media dan sarana publik agar publikasi yang dihasilkan para peneliti dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara	
	Perawatan Koleksi			✓		menjaga dan memperpanjang usia bahan pustaka, serta memastikan koleksi perpustakaan selalu siap pakai serta	dapat menjaga nilai informasi yang terkandung dalam bahan pustaka	
	Penghargaan			✓			Menarik dan memotivasi pengguna perpustakaan untuk memanfaatkan koleksi. Menumbuhkan minat baca dan cinta baca, Membangun wawasan dan kreativitas, Meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan disiplin pegawai.	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Revisi Peraturan Gubernur Aceh nomor 55 Tahun 202 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak		✓		Fasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	1. Mengatur tentang kewenangan pemerintah provinsi untuk pengutan kelembagaan kab/kota ko layak anak 2. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera 3. Memastikan pelaksanaan sistem perlindungan anak melalui pelaksanaan 24 indikator KLA termasuk kelembagaan dan kelola	Terbangunnya sistem perlindungan anak dengan mengakomodir pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	
DINAS PENDIDIKAN ACEH	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Beasiswa Pendidikan Kepada Anak Yatim dan/atau Piatu				Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu Dan/atau Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh.	Memberikan Beasiswa pendidikan berupa uang langsung kerekening siswa yatim dan/atau piatu jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan Dayah/Pasareun.	Membantu meringankan beban pendidikan kepada anak yatim dan/atau piatu jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan Dayah/Pasareun.	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Makan dan Minum Peserta Didik Pendidikan Khusus Berasrama di Aceh Tahun 2025				Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Makan dan Minum Peserta Didik Pendidikan Khusus Berasrama di Aceh Tahun 2025	Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; BAB IX Pendidikan Luar Biasa Dan Pendidikan Inklusi Pasal 42 (pasal 3 Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota meniadakan hambatan hambatan yang dapat menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan dengan menyediakan pelayanan yang memadai untuk pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusi. Bagian kedua Kewenangan Bidang Pembiayaan Pendidikan Pasal 17 (e) memberikan bantuan pembiayaan untuk madrasah, dayah, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Memberikan bantuan kepada anak Sekolah Luar Biasa yang berasrama dan langsung ke rekening penerima berupa uang	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Desain Olahraga Aceh (DOA)			✓	Peraturan presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional		Mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga aceh dalam lingkup olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga penyandang disabilitas dan industri olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya olahraga masyarakat, meningkatkan olahraga prestasi dan memajukan perekonomian daerah	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan			✓	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan		Meningkatkan pemahaman pemuda terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah di provinsi aceh dalam menciptakan pemuda yang tangguh dan berdaya saling di aceh Implementasi pelaksanaan RAD pada 5 domain dengan indikator pembangunan kepemudaan di aceh dalam mewujudkan visi cita presiden poin ke 4 tentang peran serta pemuda dalam pembangunan Indonesia	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Grand Design Kepemudaan Aceh			✓	Qanun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh		Terciptanya pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemuda aceh, serta membangun ketertarikan pemuda aceh dalam pelestarian budaya dan pembangunan daerah	
	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Pemuda				Pasal 59 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh	1. Bentuk penghargaan. 2. Tata cara pemberian.	Terapresiasinya prestasi pemuda dan memotivasi pemuda lain untuk berprestasi.	
	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Kegiatan Kepemudaan				Pasal 68 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh	1. Tata cara pemberian bantuan kegiatan kepemudaan 2. Mekanisme pemberian bantuan kegiatan kepemudaan	Terbantu pelaksanaan berbagai kegiatan kepemudaan.	
	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tipe A				Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Peningkatan klasifikasi UPTD dari kelas B menjadi UPTD kelas A dengan peningkatan lingkup tugas dan fungsi serta peningkatan jam kerja efektif.	Terjadinya peningkatan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya.	
	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Sekolah				Pasal 20 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan Olahraga Aceh	1. Tata cara pelaksanaan pembinaan Olahraga Pendidikan.	Terbentuknya peserta didik yang berprestasi dalam bidang olahraga	

SEPA	TENTANG	Jenis			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Keberbakatan Olahraga Aceh (SMAKON)					2. Tata cara pelaksanaan pengembangan Olahraga Pendidikan.		
	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya dan Mesa Pemuda				Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh	1. Tata cara pengelolaan Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya. 2. Tata cara pengelolaan Mesa Pemuda	Jalannya Retribusi Aceh di SHB dan Mesa Pemuda	
	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertukaran Pelajar Aceh				Pasal 60 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh	Bentuk Kerjasama dan Kerjasama dalam negeri dan luar negeri	Meningkatkan pelayanan Kepemudaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	
	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengembangan Pelatih/Instruktur Olahraga Rekreasi				Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh	Tata cara pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi	Terbentuknya pelatih/instruktur yang hebat, berbakat dan berkembang	
	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perlombaan Festival Olahraga Rekreasi Tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional				Pasal 25 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh	Tata cara pelaksanaan perlombaan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional maupun internasional	Terciptanya atlet berbakat dan berprestasi	
	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional				Pasal 27 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh	Tata cara pelaksanaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional dan internasional	Terciptanya atlet berbakat dan berprestasi	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Aceh Tahun 2025-2029				Tindak lanjut Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan			
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penyadaran Kepemudaan Sebagai Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan				Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 17			
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagai Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan				Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 22 sampai dengan 26			
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagai Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan				Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 28 sampai dengan 39			
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagai Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan				Tindak Lanjut Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 41 sampai dengan 42			
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pemberian Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagai Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan				Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 44 sampai dengan 47			
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagai Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan				Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 53 ayat (1)			
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda Berprestasi sebagai Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan				Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 59 ayat (1)			
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pendanaan Kepemudaan sebagai Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan				Tindak Lanjut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 67 sampai dengan 68			
DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH	Peraturan Gubernur Aceh tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Responsif dan Inklusif							
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Aceh							
DINAS KESEHATAN	Peraturan Gubernur Aceh tentang Jaminan Kesehatan Aceh				Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan	Pengaturan asarasan kepesertaan JKA	Masyarakat Aceh yang berhak mendapatkan kepesertaan JKA yang ditanggung Pemerintah Aceh	Perlu segera ditetapkan
	Peraturan Gubernur Aceh Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Korban Bencana Alam, Bencana Non Alam dan/atau Bencana Sosial				1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967). 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828). 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	Jenis-jenis bencana Jenis Bantuan Sosial bagi korban bencana Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial korban bencana Pelayanan Sosial Khusus lainnya Tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan kabupaten Kota dalam Penanganan korban bencana	Korban bencana alam, bencana non dan bencana non alam mendapatkan hak-hak nya Korban bencana alam, bencana non dan bencana non alam mendapatkan Pelayanan Sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Pemerintah mampu mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	

7

SKPA	TENTANG	Jenis			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS SOSIAL ACEH					6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. 8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.			
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Unit Layanan Disabilitas				1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601); 16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;	Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di bidang: a. Pendidikan b. Kesehatan c. Ketenagakerjaan d. Kebencanaan e. Kewirausahaan dan Koperasi f. Kesejahteraan Sosial Tugas dan Fungsi Unit Layanan Disabilitas Anggaran Pembentukan Unit Layanan Disabilitas	Penyandang Disabilitas mendapatkan hak lainnya. Penyandang Disabilitas mendapatkan pelayanan yang prima pada instansi penyelenggara pelayanan publik Pemerintah dapat mengimplementasikan kewenangannya dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	

5

SKPA	TENTANG	Jenis			DAFTAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55)			
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan Nasional dan Penerima Tanda Kehormatan Aceh				1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perysatan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Bekelanjutan Bagi Pejabat, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);	Kategori Penerima Penghargaan Bentuk Pemberian Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran	Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan Nasional dan Penerima Tanda Kehormatan Aceh mendapatkan hak baknya sesuai peraturan perundang-undangan Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan kewenangannya dalam Penanganan dan Pemberian Penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan Nasional dan Penerima Tanda Kehormatan Aceh	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH	Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025	✓			Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Aceh ini merupakan pedoman kepada SKPA dan Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025	Perencanaan dan penganggaran SKPA dan Kabupaten/Kota tahun 2025 menjadi lebih fokus, terukur, dan tepat sasaran.	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat (Renja-SKPA) Aceh Tahun 2025	✓			Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Aceh ini merupakan pedoman kepada SKPA dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Perencanaan dan penganggaran SKPA sesuai dengan Isu Strategis, Tupoksi dan Kewenangan	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Program dan Kegiatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025	✓			Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus	Peraturan Gubernur Aceh ini bertujuan untuk menentukan Pagu Indikator Program dan Kegiatan Bersama Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025	Menjadi acuan Pemerintah Aceh dalam menyusun Program dan Kegiatan bersama Tahun Anggaran 2025	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (P-RKPA) Tahun 2025	✓			Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Aceh ini merupakan pedoman kepada SKPA dalam melakukan perubahan terhadap perencanaan dan penganggaran tahun 2024	Perencanaan dan penganggaran SKPA menjadi lebih fokus, terukur, dan tepat sasaran.	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat (P-Renja-SKPA) Aceh Tahun 2025	✓			Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Aceh ini merupakan pedoman kepada SKPA dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Perubahan Perencanaan dan penganggaran SKPA sesuai dengan Isu Strategis, Tupoksi dan Kewenangan	
	Peraturan Gubernur tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Aceh 2025 - 2029				Permendagri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022 - 2024	Memberikan landasan logis, terukur dan komprehensif bagi pemerintah provinsi terkait pengelolaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi dalam melaksanakan rencana pengembangan lima (5) tahun ke depan bagi pembangunan sanitasi di Provinsi	Menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi oleh pemerintah provinsi dan menjadi pedoman perangkat daerah provinsi dalam melakukan pendekatan dan strategi kebijakan pembangunan sanitasi guna melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan pencapaian target RPJMD	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus				Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus	Peraturan Gubernur Aceh ini merupakan pedoman kepada SKPA dan Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026 untuk alokasi sumber Dana TDBH Migas dan Otonomi Khusus	Perencanaan dan penganggaran SKPA dan Kabupaten/Kota tahun 2026 untuk sumber Dana TDBH Migas dan Otonomi Khusus menjadi lebih fokus, terukur, serta tepat sasaran.	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		✓		Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk memperkuat pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan	Masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program pembangunan	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Induk Pertumbuhan Hijau Aceh				Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat, sektor swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengembangan komoditas yang memiliki keunggulan dan nilai strategis berbasis kawasan terintegrasi dan berpegang pada prinsip keberlanjutan	Aceh dapat meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau, meningkatkan PDRB hijau, serta membangun kegiatan ekonomi dan industri rendah karbon untuk mitigasi perubahan iklim	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengembangan Komoditi Unggulan dan Strategis Berkelanjutan Aceh				Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengembangan Komoditi Unggulan dan Strategis Berkelanjutan Aceh	Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh, sektor swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Kakao yang memiliki keunggulan dan nilai strategis	Aceh dapat meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru, Meningkatkan PDRB dari sektor Darat dan Laut, mengurangi emisi karbon (untuk mencapai net zero emission pada tahun 2043) serta beradaptasi terhadap perubahan iklim	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Peta Jalan Pengembangan Kakao Aceh Tahun 2025-2045				Peraturan Gubernur Aceh tentang Peta Jalan Pengembangan Kakao Aceh Tahun 2025-2045	Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh, sektor swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Kakao yang memiliki keunggulan dan nilai strategis	Aceh dapat melahirkan dokumen dan meningkatkan Indeks Ekonomi dan Meningkatkan PDRB serta beradaptasi terhadap perubahan iklim	

SKPA	TENTANG	Jenis			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025	✓			1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Mengatur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024	Memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran daerah untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib apabila APBA Tahun Anggaran 2024 terlambat ditetapkan	Bidang Perbendaharaan
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Dendanya, Pajak Progresif serta Denda Pajak Air Permukaan							
	Peraturan gubernur Aceh tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2025			✓	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025	Mengatur tentang penghitungan dasar pengenaan pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum Tahun 2025	Muatan Baru dan Penyesuaian Nilai Jual Kendaraan Bermotor dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi PKB dan BBNKB	Bidang Pendapatan
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2025			✓	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025	Mengatur tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Alat Berat (PAB) untuk alat berat pembuatan sebelum tahun 2025	Muatan baru dan penyesuaian Nilai Jual Alat Berat dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi PAB	Bidang Pendapatan
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Peninjauan Tarif Retribusi Aceh	✓			1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Mengatur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Aceh	Penyesuaian tarif Retribusi Aceh dalam rangka intensifikasi Retribusi Aceh	Bidang Pendapatan
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi	✓			1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Mengatur tentang Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi	Penyesuaian tarif Retribusi Aceh dalam rangka ekstensifikasi Retribusi Aceh	Bidang Pendapatan
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2025	✓			1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Tahun 2025 tentang Pemberian Gaji, Penslup, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2025; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Mengatur Teknis Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2025	Terbayar Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2025	Bidang Perbendaharaan
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2025	✓			1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS Tahun 2025; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan	Mengatur Teknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2025	Terbayarnya Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2024	Bidang Perbendaharaan
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026	✓			1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Mengatur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026	Memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran daerah untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib apabila APBA Tahun Anggaran 2026 terlambat ditetapkan	Bidang Perbendaharaan
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Daerah	✓			1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informal Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Mengatur tentang tata cara penatausahaan penerimaan daerah	Terbitnya penatausahaan penerimaan daerah	Bidang Perbendaharaan
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengelolaan Kas			✓	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Mengatur pengelolaan kas Pemerintah Aceh	Terbitnya pengelolaan kas daerah	Bidang Perbendaharaan
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh			✓	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Mengatur tentang perubahan beberapa pasal pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh	Optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak Aceh dan Retribusi Aceh.	Bidang Pendapatan
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pemeriksaan Pajak dan Pengalihan Pajak			✓	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Mengatur tentang Pedoman Pemeriksaan dan Pengalihan Pajak Aceh	Pedoman pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi daerah	Bidang Pendapatan
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Nilai Perolehan Air Permukaan				1. Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh;	Mengatur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai Dasar Penghitungan Pajak Air Permukaan	Penambahan muatan pasal-pasal yang bersifat substansial dan <i>urgent</i> pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan dalam rangka memperbaiki tata kelola pemungutan Pajak Air Permukaan	Bidang Pendapatan
					2. Peraturan gubernur Aceh tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh;			
					3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan;			
					4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air untuk menghitung Pajak Air Permukaan;			
					5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan.			
					Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.	1. Pengaturan umur piutang; 2. Perhitungan penyisihan piutang;	Optimalisasi pengurusan piutang daerah	Bidang Akuntansi

6

1	SKPA	TENTANG	Jenis			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			Rutin	Revisi	Baru				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Peraturan Gubernur Aceh tentang Penghapusan Piutang		✓			3. Klasifikasi piutang lancar, kurang lancar dan macet; 4. Kriteria penyelesaian piutang yang dapat serahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); 5. Metode penghapusan piutang.		
		Peraturan Gubernur Aceh tentang Kebijakan Akuntansi		✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koreksi atas pencatatan tahun sebelumnya; 2. Penambahan masa manfaat atas beberapa aset tetap peralatan dan mesin; 3. Kriteria Aset Extracore.		Bidang Akuntansi
		Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembebasan Pajak Atas Kendaraan Bermotor			✓	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.	Mengatur tentang pembebasan pajak atas kendaraan bermotor	mengatasi kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun	Bidang Pendapatan
BADAN KEPEGAWAIAN ACEH		Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh				1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.	Jenis-jenis penghargaan, tata cara penilaian dan penetapan	Amanat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam konsideran draft pengub (terlampir) dan masuk dalam indikator NSPK manajemen ASN	
		Rancangan Peraturan Gubernur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Aceh				1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.	Pengaturan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengenai kewajiban, larangan, tata cara pemeriksaan, sanksi dan peninjauan hukuman	Amanat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam konsideran draft pengub (terlampir)	
		Rancangan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh				1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/US/M.PAN/04/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	Penyesuaian terhadap Pejabat/Penyelenggara Negara yang ditetapkan sebagai Wajib Laport	Amanat peraturan KPK dan masuk dalam indikator MCP KPK "Perluasan Wajib Laport"	
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH		Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Perwalian		✓		Pasal 145, 146, 147, 148 dan 149 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal	1. Kedudukan dan tanggungjawab 2. Pendataan anak yatim/orang dewasa, wali dan hartanya 3. Koordinasi antar lembaga/instansi 4. Pembiayaan pengawasan perwalian	Untuk mewujudkan kepastian hukum perlindungan anak yatim dan/atau harta anak yatim dan penetapan wali pengampu oleh Mahkamah Syariah	Skala Prioritas
		Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh (perubahan)		✓		Pasal 120 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal	1. Pengaturan Rekening Belanja Zakat dan Infak 2. Rekening bersaldo Zakat dan Infak 3. Pengaturan fleksibilitas penyaluran/pencatatan zakat dan infak	Fleksibilitas pengelolaan belanja zakat dan infak	Skala Prioritas
		Rancangan Peraturan Gubernur tentang Hak Keuangan DPS, Badan BMA, Tenaga Profesional, Tenaga Pendamping Tidak Tetap dan Relawan			✓	Pasal 86 ayat 1, 2, 3 dan 4 Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal	Hak Keuangan DPS, Badan BMA, Tenaga Profesional, Tenaga Pendamping Tidak Tetap dan Relawan	Sebagai pedoman dalam penganggaran dan pedoman pada standar pembiayaan Pemerintah Aceh	Skala Prioritas
		Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tenaga profesional		✓		Pasal 8 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal	1. Kedudukan, Tugas dan fungsi Tenaga Profesional 2. Penghapusan Tenaga Profesional pada Sekretariat	Untuk mewujudkan kewenangan Tenaga Profesional dibawah Badan BMA	Skala Prioritas

15

SKPA	TENTANG	Jenis			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH	Rancangan peraturan gubernur pelaksanaan reparasi untuk penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM masa lalu di Aceh tahun 2024			✓	1. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;	Penetapan peraturan pelaksana reparasi mengatur tentang prinsip pelaksanaan Reparasi; pelaksana dan Penerima Reparasi; kewajiban pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; data dan Informasi; pemantauan, pengawasan dan koordinasi; partisipasi masyarakat. peraturan ini juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk reparasi dan jenis layanan yang di rekomendasikan kepada penerima reparasi.	1. Memberikan panduan/pedoman bagi pemangku kepentingan untuk pelaksanaan rekomendasi reparasi KKR Aceh 2. Menjadi acuan bagi pemangku kepentingan untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan reparasi rekomendasi KKR Aceh 3. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan pemangku kepentingan	
	Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Kewenangan Badan Reintegrasi Aceh			✓	1. Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 2. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepakatan Damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh	- Konsolidasi Perdamaian - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik - Pelayanan dan rehabilitasi sosial Masyarakat Korban Konflik - Pendidikan Damai - Pencegahan dan Mitigasi Konflik	memenuhi hak dasar di bidang Ekonomi Politik dan Sosial Budaya untuk Kesejahteraan masyarakat Aceh meliputi Eks Kebutuhan, Tapol Napol dan Masyarakat yang berdampak korban konflik	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pelaksanaan Qanun Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan							



GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

M. NASIR